

## **Nasionalisme dan Pancasila Perspektif Sukarno**

Wendy Anugrah Octavian<sup>1</sup>, Puspa Dianti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Palembang, Jl. Jenderal Ahmad Yani, 13 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan

<sup>2</sup> Universitas Negeri Sriwijaya, Jl. Raya Palembang-Prabumulih KM.32 Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan  
wendy\_wao@yahoo.com

### **Abstract**

This paper intends to find out various things that are very important about nationalism, Pancasila in Sukarno's perspective. The method used in this research is descriptive research method with a qualitative approach. The descriptive method can be interpreted as an effort made to reveal the situation and provide an objective description of the object under study. Data collection techniques from this study used literature studies. Researchers interpret the meaning of existing theories and articles. The result of this study is that nationalism or socio-nationalism according to Sukarno's view is nationalism that is humanist, originates from the Indonesian people themselves, not from other nations, and is more concerned with the nation and state than individual or group interests. The basic values of Pancasila put forward by Sukarno are the result of excavations from religion, culture, customs that exist in the life of the Indonesian nation and have been applied in the daily life of Indonesian society. Sukarno placed the precepts of God at the base or final sequence meaning that God was the initial basic foundation for the creation or formation of the other precepts, not positioning God below.

**Keywords:** Nationalism, Pancasila

### **Abstrak**

Tulisan ini bermaksud untuk mengetahui berbagai hal yang sangat penting mengenai nasionalisme, Pancasila dalam perspektif Sukarno. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mengungkapkan keadaan dan memberikan gambaran secara objektif dari objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan studi literature. Peneliti melakukan interpretasi makna terhadap teori dan artikel yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah Nasionalisme atau sosio-nasionalisme menurut pandangan Sukarno ialah nasionalisme yang humanis, berasal dari bangsa Indonesia sendiri bukan berasal dari bangsa lain, serta lebih mementingkan bangsa dan negara daripada kepentingan Individu ataupun kelompok. Nilai-nilai dasar dari Pancasila yang dikemukakan Sukarno merupakan hasil penggalian dari agama, kebudayaan, adat istiadat yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia dan telah diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat Indonesia. Sukarno menempatkan sila Ketuhanan pada urutan dasar atau akhir bermakna bahwa Tuhan merupakan landasan dasar awal dari terciptanya atau terbentuknya dari sila-sila yang lainnya, bukan memposisikan Tuhan berada dibawah. agar sebagai dasar utama terlaksananya asas-asas sebelumnya untuk dijalankan berdasarkan Ketuhanan.

**Kata Kunci:** Nasionalisme, Pancasila

Copyright (c) 2023 Wendy Anugrah Octavian, Puspa Dianti

Corresponding author: Wendy Anugrah Octavian

Email Address: wendy\_wao@yahoo.com (Jl. Jenderal Ahmad Yani, 13 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan)

Received 31 January 2023, Accepted 06 February 2023, Published 07 February 2023

## **PENDAHULUAN**

Banyak orang mengenal Sukarno sebagai sosok tokoh nasionalis dari bangsa Indonesia. Walaupun pemikiran-pemikiran Sukarno lebih banyak menyerap pandangan dari banyak tokoh-tokoh dan juga dari beragam ideologi yang ada seperti Marxis, Sosial Demokrasi (Sosdem), Islamis sampai Liberalis. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa Soekarno juga mengakui dirinya sebagai seorang nasionalis, marxis dan juga muslimin. Namun, di kalangan masyarakat Indonesia dan dunia Sukarno tetap di pandang sebagai golongan kaum nasionalis. Bahkan, ada juga beberapa golongan

berpandangan bahwa Sukarno sebagai seorang pemimpin yang mengarah kepada haluan ultra-nasionalis atau fasis. Pandangan ini dikemukakan oleh mereka yang berpaham ideologi sos-dem dan humanisme universa. Sutan Syahrir pernah mengemukakan kekhawatirannya terhadap landasan dari ideologi Sukarno yang lebih dominan kearah fasisme

Sebagai salah satu pendiri bangsa Indonesia Sukarno juga dikenal sebagai salah satu penggali nilai-nilai Pancasila yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang pertama, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa Sukarno menjadi salah satu yang berperan penting dalam menentukan dasar negara Indonesia. Namun, urutan dari sila-sila Pancasila yang disampaikan Sukarno dalam pidatonya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 memiliki perbedaan yang signifikan dengan tata urutan sila-sila Pancasila yang terdapat dalam dokumen dari Piagam Jakarta hasil dari perumusan panitia sembilan, dan juga dalam pembukaan UUD NRI 1945, mau pun dalam dokumen-dokumen lainnya.

Pidato mengenai dasar negara yang dilakukan oleh Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang saat ini dikenal sebagai lahirnya istilah nama Pancasila tersebut terdapat perbedaan yang cukup mendasar pada tata urutan Pancasila utamanya berkaitan erat dengan sila “Ketuhanan” menempati psosi kelima, dan kemudian pada Pancasila saat ini kedudukan sila “Ketuhanan” berada diatas menjadi sila pertama. Lalu apakah dapat dikatakan bahwa Pidato Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengutamakan nilai kebangsaan atau nasionalisme daripada dimensi keimanan, karena nilai kebangsaan atau nasionalisme berada pada urutan teratas atau yang pertama sedangkan ketuhanan berada pada posisi paling bawah yaitu urutan kelima. Jika dilihat secara sepintas pernyataan tersebut dapat dikatakan benar karena seharusnya nilai Ketuhanan yang merupakan causa meteril dari sila-sila yang ada dibawahnya berada pada urutan teratas. Namun ketika dilakukan analisis secara mendalam pernyataan tersebut tidak tepat harus perlu melakukan pemahaman dengan secara mendalam dalam memaknai alur pandangan Sukarno mengenai Ketuhanan. Akibat dari menempatkan prinsip Ketuhanan pada posisi terakhir ini sering menjadi pertanyaan oleh berbagai pihak. Penempatan kedudukan sila “Ketuhanan” pada urutan terakhir membuat banyak orang berpikir bahwa Sukarno merupakan seorang nasionalis sekuleris. Namun anggapan seperti ini tidaklah tepat jika dilakukan penelaahan pemikiran-pemikiran Sukarno yang terdapat didalam berbagai tulisannya dan juga pidatonya yang menunjukkan nilai-nilai ketuhanan. Seperti di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1, dapat dilihat dengan jelas bahwa Sukarno berupaya mempertemukan dari berbagai macam aliran pemikiran yang oleh banyak kalangan sangat mustahil dapat dipertemukan.

Berpedoman pada pembahasan di atas, perlu kiranya dilakukan pengkajian mengenai Nasionalisme dan Pancasila dari sudut pandang Sukarno, sebagaimana telah diketahui bahwa Sukarno merupakan salah satu yang menggali kembali nilai-nilai Pancasila, Sukarno menekankan jika sangat penting untuk membangun jiwa dan karakter bangsa yaitu Pancasila yang merupakan kepribadian dari bangsa Indonesia. Tulisan ini bermaksud untuk melakukan pengkajian mengenai pikiran-pikiran sukarno terkait

perbedaan nasionalisme atau sosio-nasionalisme Sukarno dan nasionalisme eropa, penerapan serta Pancasila dari Pemikiran Sukarno.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif . Metode deskriptif dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mengungkapkan keadaan dan memberikan gambaran secara objektif dari objek yang diteliti, (Sugiyono, 2013). Pemilihan metode deskriptif kualitatif ini tepat digunakan untuk menggambarkan pemikiran Sukarno mengenai nasionalisme dan Pancasila. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan studi literature. Peneliti melakukan intepretasi makna dari berbagai sumber yang ada.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Perbedaan Nasionalisme Sukarno dan Nasionalisme Eropa***

Sosio-nasionalisme merupakan gagasan nasionalisme yang dikemukakan oleh Sukarno ketika perumusan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI. Sukarno (1964: 5) mengatakan sosi-nasionalisme merupakan nasionalisme Indonesia bukan hanya mempopulerkan bangsa sendiri kepada bangsa lain melainkan nasionalisme yang lebih mengutamakan kepentingan kehidupan umat manusia. Artinya bahwa landasan dari nasionalisme yang dikehendaki sukarno ialah kemanusiaan. Selain itu, Sukarno (1964: 11-15) juga pernah menyampaikan pendapatnya kembali bahwa nasionalisme Indonesia adalah kemanusiaan bukan nasionalisme chauvanis ataupun tiruan dari nasionalisme barat. Secara tidak langsung dapat dipahami bahwa antara sosio-nasionalisme Sukarno dengan paham humanisme memiliki kesesuaian antra satu sama lainnya, sehingga banyaknya kekhawatiran selama ini terjadi terkait dari paham nasionalisme sukarno yang mengarah kepada Fasisme tidaklah beralasan

Perlu diketahui bahwa nasionalisme dari bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan nasionalisme yang lahir dan berkembang di Eropa. Sukarno (1964: 9) mengatakan Nasionalisme Eropa ialah lebih mengarah kpada sesuatu yang bersifat agresif yaitu suatu nasionalisme mengutamakan kepentingan pribadi, nasionalisme perdagangan yang mengedepankan keuntungan sendiri , nasionalisme seperti ini pada akhirnya akan hilang. Jika dilakukan penelaahan lebih dalam maka sangatlah jelas bahwa latarbelakang historis dari nasionalisme Indonesia dan eropa sangatlah berbeda. Nasionalisme Indonesia lahir akibat dari adanya kondisi nusantara yang terjajah. Artinya bahwa Nasionalisme dari bangsa Indonesia atau sosio-nasionalisme Sukarno lahir sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap pihak penjajah. Dalam artian lain, nasionalisme Indonesia sangat dibutuhkan untuk dapat menjadi “penguat dan pemersatu” bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan. Sosio-nasionalisme Sukarno atau nasionalisme dari bangsa Indonesia adalah nasionalisme yang lahir dari penderitaan yang dialami masyarakat Indonesia

karena penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain. Oleh sebab itu, nasionalisme yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah nasionalisme yang berkemanusiaan, menolak penindasan dan juga mengecam keras penjajahan.

Berbeda dari nasionalisme Indonesia, Nasionalisme Eropa lahir akibat dari adanya hubungan yang berkaitan erat dengan kepentingan kaum-kaum merkantilis-pedagang Eropa yang melakukan pencarian bahan baku ke luar Eropa untuk kepentingan ekonomi mereka. Semboyan *Gold, Gospel dan Glory* mencerminkan nafsu kolonial tersebut. Nasionalisme Eropa dijadikan sebagai merupakan tool kaum-kaum merkantilis yang ada di Eropa untuk memberikan dukungan gereja dan rakyat bagi terwujudnya ekspansi kolonial ke luar benua Eropa.

Soekarno (1964: 19-34) mengungkapkan bahwasanya nasionalisme dari bangsa Indonesia merupakan nasionalisme lebih mengutamakan kepentingan rakyat, bukan seperti nasionalisme Eropa yang lebih mengutamakan nasionalisme pribadi maupun kaum-kaum tertentu. Oleh karena itu, Nasionalisme atau sosio-nasionalisme Sukarno haruslah di iringi dengan diberlakukannya sistem ekonomi-politik yang mana memberi ruang seluas-luasnya bagi rakyat kebanyakan (*Marhaen*) untuk dapat mengelola dan mengontrol sumber-sumber dari ekonomi strategis yang akan diperuntukan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sistem ini disebut oleh Sukarno sebagai Sosio-Demokrasi yang sejatinya tidak dapat dipisahkan dari sosio-nasionalisme sebagai landasan kebangsaan Indonesia. Kedua konsep inilah serta ditambah dengan faham Ketuhanan dikemudian hari dikenal sebagai Trisila Sukarno. Sekali lagi tentunya hal ini sangatlah bersebrangan dengan faham nasionalisme Eropa yang lebih memprioritaskan kepentingan dari golongan merkantilis dan borjuis, yang mana golongan-golongan ini ingin melakukan kolonialisasi ke luar Eropa serta perlahan-lahan melakukan penghancuran tatanan feodal di Eropa. Muara akhir dari hancurnya feodalisme tersebut adalah kemenangan borjuasi yang terdapat di Eropa, yang selanjutnya menjadi algojo penindas bagi masyarakat yang lemah.

### ***Pancasila dalam Perspektif Sukarno***

Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPKI Sukarno menyampaikan pendapatnya mengenai rumusan dasar negara. Sukarno mengemukakan lima nilai dasar negara yaitu nilai kebangsaan atau nasionalisme, nilai kemanusiaan atau internasionalisme, Demokrasi atau Mufakat, Kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan. Kelima rumusan nilai dasar negara tersebut oleh Sukarno diberi nama Pancasila.

### ***Nilai Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme***

Sila Kebangsaan atau nasionalisme disampaikan oleh Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada dalam sidang Pertama BPUPKI. Maksud dari kata kebangsaan ini ialah bangsa Indonesia yang akan merdeka bukan untuk kepentingan individu, golongan maupun kaum tertentu, (Saksono, 2007: 75). Sila kebangsaan merupakan suatu spirit yang membakar hasrat dan menimbulkan optimisme untuk suatu kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia akan dapat mempertahankan kehidupannya melalui nilai kebangsaan ini, sekaligus juga memberi kekuatan untuk berjuang dari keterjajahan yang

dilakukan oleh kolonial dan memberi kekuatan hidup bangsa. Sampai saat ini semangat perjuangan untuk membangun kehidupan bangsa Indonesia yang maju masih tetap berkobar di dalam diri masyarakat Indonesia, (Saksono, 2007: 78).

Nilai Persatuan Indonesia atau kebangsaan adalah merupakan sesuatu cita-cita politik yang tidaklah mudah untuk dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat yang beranekaragam. Tantangan yang palang besar ialah proses bagaimana dapat membangun kesadaran berbangsa dan kesadaran berbudaya secara beriringan. Bangsa Indonesia memiliki beberapa bagian-bagian didalamnya Seperti masyarakat-masyarakat Indonesia, keluarga-keluarga yang ada di Indonesia, kelompok- kelompok, golongan-golongan yang hidup dalam bangsa Indonesia, suku bangsa yang beragam, sedangkan wilayah terdiri atas pulau-pulau tidak sedikit jumlahnya, kesemuanya itu dalam kesatuannya membentuk sesuatu yang baru yaitu negara baru yang disebut bangsa Indonesia, (Kaelan, 2013: 271), jika masing-masing bagian tersebut berdiri sendiri-sendiri maka itdak akan terbentuk negara Indonesia, (Kaelan, 2013: 271). Nilai kebangsaan sila pertama dari dasa negara yang diajukan oleh Sukarno.

Nilai kebangsaan yang dikemukakan Sukarno merupakan prinsip kebangsaan yang humanis tidak memandang rendah bangsa lain serta juga bukan nilai kebangsaan yang bersifat chauvinisme. Faham kebangsaan yang dimaksud Sukarno bukanlah dibangun berlandakan dari ras tertentu, suku bangsa kebudayaan ataupun agama tertentu, (Sukarno, 1964: 24). Selanjutnya, kebangsaan yang dikemukakan Suukarno tidak hanya berdasarkan paham dari suatu kelompok manusia yang berkeinginan untuk bersatu menjadi bangsa yang baru maupun berdasarkan paham persatuan watak yang muncul dari persamaan nasib (Sukarno, 1964: 24). Dalam tersebut, Sukarno sangat menyadari sesungguhnya untuk mewujudkan persatuan nasional bang Indonesia diperlukan “Identitas Nasional”. “Kepribadian Nasional” dan “Berkepribadian dalam Kebudayaan”, (Kaelan, 2013: 271). Sukarno sadar dan sangat paham bahwa sesungguhnya manusia sebagai majemuk tunggal harus selalu melakukan perbuatan yang dilakukannya baik itu lahir dan batin harus sejalan dengan akal dan rasa. Hasrat-hasrat yang dilakukan mannusia dalam suatu perbuatan ini (hasrat keinginan) berkaitan erat mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan eksistennya sebagai makhluk individu, dan juga berkaitan erat pribadi yang berdiri sendiri sekaligus makhluk Tuhan yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan tunggal ‘monopluralis’, (Latif, 2011: 369). Hal tersebut menjadi Indonesia menjadi negara yang kuat sehingga dapat bertahan hingga sampai saat ini dan ketika bangsa Indonesia melaksanakan nilai kebangsaan menurut Soekarno tersebut maka kehidupan bangsa Indonesia akan semakin bersatu dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis.

Rasa kebangsaan Sukarno mengacu pada sejarah kehidupan nyata dari bangsa Indonesia sendiri yang telah direnggut kebebasannya oleh kaum penjajah. Sukarno menginginkan kembali kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar dan merdeka seperti kejayaan yang pernah ada di nusantara saat masa-masa kerajaan. Sukarno menegaskan bahwa hasrat kebangsaan untuk kembali pada kepribadian yang dimiliki bangsa sengdiri haruslah hidup di dalam kalbu,

(Hamka, 2011: 44). Selanjutnya, Sukarno mengatakan bahwa rasa kebangsaan yang disampikannya dalam sidang BPUKI pertama pada tanggal 1 Juni 1945 telah lama dikemukakan olehnya saat dirinya menghadapi persidangan pengadilan penjajah kolonial yang berada di Bandung. Ketika itu Sukarno menyampaikannya kepada para hakim yang mengadilinya bahwa semangat dari rakyat terjajah oleh penjajah adalah semangat ialah semangat untuk menjadi bangsa yang merdeka, (Hamka, 2011: 44). Rasa kebangsaan yang dikemukakan Sukarno berasal dari penderitaan dari rakyat Indonesia akibat penjajahan yang dilakukan kolonial, Perampasan kemerdekaan yang dilakukan kolonial inilah yang menyebabkan lahirnya keinginan dalam diri untuk berjuang melepaskan diri dari penjajahan demi mendapatkan kembali masa kejayaan seperti dulu. Rasa kebangsaan Sukarno ialah adanya pengakuan jati diri atau kepribadian dari bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar.

Agar dapat membangun masa-masa kejayaan di masa depan nanti, haruslah mengingat kejayaan masa lalu dan juga harus memiliki semangat perjuangan untuk merdeka. Masa lalu akan menjadi faktor pemicu dari bangkitnya tekad di dalam diri untuk bersama-sama berjuang melepaskan diri dari ketrjajahan. Sukarno berpandangan bahwa rakyat Indonesia harus memiliki pengetahuan mengenai kebesaran dan kejayaan hari agar dapat menumbuhkan kembali rasa nasionalismenya, serta memercik api harapan keinginan untuk merdeka. Untuk dapat mendapatkan kemerdekaan bangsa Indonesia harus memiliki rasa nasionalisme menyala. Dengan memiliki sikap nasionalisme yang positif, maka rakyat Indonesia akan dapat merasakan di dalam dirinya mengenai kebenaran pandangan mengenai nasionalisme yang demikian tersebut adalah yang diridhai Allah.

#### *Nilai Perikemanusiaan atau Internasionalisme*

Sukarno mengemukakan bahwa tujuan dari nilai internasionalisme ini bukan hanya ditujukan untuk membangun rasa nasionalisme di dalam negeri sendiri yang dimerdekakan, melainkan juga bermaksud untuk lebih membangun kekeluargaan antara bang-bangsa yang ada di dunia. Pada era saat ini lebih dikenal sebagai suatu usaha untuk membangun hubungan kerjasama yang baik antar bangsa-bangsa di dunia demi mewujudkan perdamaian dunia (Saksono, 2007: 68-69). Pemikiran Sukarno mengenai Perikemanusiaan atau Internasionalisme ini merupakan hasil penggalian yang dilakukannya dari budaya-budaya yang ada dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri.

Beberapa ratus atau ribuan tahun yang lalu nilai kemanusiaan telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti agama Hindu mengajarkan kepada masyarakat Indonesia mengenai Tat Twam Asi (Dia adalah aku, aku adalah dia), ajaran ini ialah ajaran mengenai rasa kemanusiaan itu sendiri. Selanjutnya, di dalam agama Islam mengajarkan pula mengenai pelayanan sosial dikenal dengan sebutan fardhu kifayah (kewajiban yang dilakukan untuk kepentingan umum) yang biasanya kegiatan ini dilakukan masyarakat secara bersama-sama atau gotong royong. Ajaran fardhu kifayah dari agama Islam ini dapat membuat rasa kemanusiaan Bangsa Indonesia lebih kuat. Kemudian ajaran perikemanusiaan juga diajarkan dalam agama Kristen yaitu mengajarkan antar sesama manusia harus memberikan cinta kasih seperti layaknya mencintai diri sendiri. Sesungguhnya di dalam ajaran agama Islam juga terdapat perintah untuk mencintai antar sesama sebagaimana perkataan nabi yang

mengatakan bahwa “tidak beriman seorang dari kamu sampai ia mencintai untuk saudaranya seperti ia mencintai untuk dirinya sendiri”, (Hamka, 2011: 43). Rasa kemanusiaan dari bangsa Indonesia bukanlah ciptaan dari Soekarno melainkan suatu nilai kemanusiaan yang telah hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dahulu. Soekarno pernah mengatakan bahwa dirinya bukanlah penemu Pancasila melainkan hanya sebagai penggali dari perasaan bangsa Indonesia itu. Sukarno mengatakan bahwa menggali nilai kemanusiaan dan ketuhanan dari kehidupan bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang harus diherankan, (Hamka, 2011: 43).

Sukarno memiliki pendapat bahwa internasionalisme tidak dapat tumbuh dengan hidup jikalau tidak mengakar pada ruang nasionalisme dan nasionalisme tidak akan dapat tumbuh dengan subur jika tidak berada pada tatanan taman sarinya internasionalisme. Sukarno menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari melakukan hubungan dengan bangsa-bangsa lain, karena jika Bangsa Indonesia tidak melakukan hubungan dengan bangsa lain maka akan menjadi negara yang terasingkan. Soekarno berpendapat bahwa manusia pada dasarnya pada abad ke 20 terdiri dari berbagai bangsa-bangsa yang ada. Pada abad ini apabila ada suatu bangsa yang tidak melakukan hubungan dengan bangsa lain maka eksistensi negara tersebut tidak akan dapat bertahan lama. Manusia itu adalah makhluk sosial yang bergantung antar satu sama lainnya, begitu juga dengan suatu bangsa tidak dapat melepaskan diri dari bangsa lain, keberlangsungan hidup suatu bangsa hanyalah dapat diraih jika dapat berada di dalam masyarakatnya bangsa-bangsa, (Sukarno, 1946:51).

#### *Nilai Mufakat atau Demokrasi*

Sukarno menegaskan bahwa Bangsa Indonesia bukanlah milik satu orang maupun golongan-golongan tertentu, melainkan Indonesia satu untuk semua, semua buat satu. Sukarno sangat meyakini bahwa syarat utama agar bangsa Indonesia menjadi negara yang kuat ialah dengan musyawarah mufakat. Dengan adanya kemufakatan antar sesama maka akan dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Budaya musyawarah untuk memecahkan permasalahan agar mencapai mufakat telah sejak lama diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dahulu yang masih berbentuk kerajaan telah melakukan musyawarah yang wujud kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara demokrasi. Praktik-praktik demokrasi yang ada dalam praktik kehidupan bangsa Indonesia lebih dulu ada dibandingkan teori demokrasi Barat, Sukarno mengatakan bahwa sebelum adanya teori-teori yang diungkapkan Montesquieu, Voltaire, Rousseau, sebelum adanya teori Trias Politica, sebelum adanya parlemen-parlemen di dunia Barat, Bangsa Indonesia telah mengamalkan nilai demokrasi sejak dahulu yaitu menerapkan demokrasi dalam bentuk secara kuno. Oleh sebab itu, demokrasi saat ini tidaklah asing bagi bangsa Indonesia, (Sukarno, 1964: 52).

Sebagai bagian dari umat Muslim Sukarno secara lantang memproklamkan akan menjunjung tinggi kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Demokrasi dari bangsa Indonesia bukanlah hanya sekedar alat teknik, melainkan mengandung jiwa serta perasaan dari kepribadian bangsa Indonesia dan cita-cita nasional, maka dari itu hendaknya pelaksanaan dari demokrasi yang ada di Indonesia belandaskan pada kepribadian bangsa Indonesia serta mewujudkan

cita-cita nasional yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, (Latif, 2011: 476). Sukarno pun berpesan kepada kelompok dari agama Islam dan Kristen agar bekerja sama agar terdapat perwakilan dari kedua agama tersebut pada kursi-kursi badan perwakilan rakyat.

#### *Nilai Kesejahteraan Sosial*

Sukarno secara sederhana mengartikan kesejahteraan sebagai suatu prinsip yang mana pada kehidupan bangsa Indonesia tidak boleh ada yang miskin, (Saksono, 2007: 81). Seperti sila sebelumnya, nilai keadilan sosial yang dikemukakan Sukarno merupakan berasal dari budaya bangsa sendiri yang sudah lama ada sebelum Indonesia merdeka. Nilai kesejahteraan sosial telah hidup, tumbuh dan berkembang serta dilakukan pada masa-masa keemasan zaman kerajaan dahulu, seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram maupun dari beberapa kesultanan yang ada, baik yang berada di kepulauan Jawa ataupun diluar Jawa. Bangsa Indonesia terkenal sebagai suatu bangsa yang kaya akan sumber daya alamnya, seperti yang tertulis dalam kitab-kitab zaman kuno dulu yaitu gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja, makna dari sebuah ungkapan Jawa ini ialah melukiskan keadaan dari suasana kehidupan masyarakat Indonesia dahulu kala hidup pada negeri yang subur, makmur, teratur, tentram dan aman sejahtera bebas dari penjajah yang menguasai negeri ini. Kehidupan bangsa dahulu yang makmur serta sejahtera harus kembali diwujudkan pada saat Indonesia telah merdeka nanti, (Hamka, 2011: 46).

Pada saat ini suasana kehidupan yang makmur dan sejahtera dari bangsa Indonesia tidak dapat dirasakan lagi semenjak kolonial menjajah, saat penjajahan terjadi bangsa Indonesia hidup dalam kesengsaraan dan kemiskinan. Rasa keadilan sosial ketika Indonesia terjajah tidak dapat dirasakan lagi, berharap bangsa Indonesia kembali mendapatkan kejayaannya seperti semula dan lepas dari penyiiksaan yang dilakukan oleh perampok kolonial. Untuk dapat mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia tersebut maka diperlukan hasrat ingin merdeka agar tercapainya kehidupan yang makmur dan sejahtera. Perasaan ingin merdeka agar terwujudkannya kehidupan yang adil dan sejahtera merupakan nilai dasar negara yang dikemukakan Sukarno untuk kemudian hari akan dijadikan salah satu sila dari Pancasila, kandungan dari sila keadilan berasal dari idealisme yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri.

Sukarno berpendapat bahwa keadilan sosial merupakan suatu proses pemenuhan kehidupan yang layak bagi suatu Individu yang terjajah kemiskinan, (Latif, 2011: 583). Sukarno ingin mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Sukarno ingin menjadikan Indonesia menjadi negara kesejahteraan yang pemerintahannya demokratis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dalam hal lain juga pemerintah harus dapat mengatur dan membagi kekayaan yang ada agar tidak terdapat rakyat yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan juga agar tidak terjadi lagi kematian tidak mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah. Diperlukan etika dalam politik bernegara agar dapat mewujudkan negara kesejahteraan Indonesia, bukan melakukan perampokan hak milik pribadi seseorang, Hak milik pribadi Individu memiliki fungsi sosial negara

bertugas menjaga, melindungi, memenuhi, serta negara bertanggung jawab atas kesejahteraan umum dalam masyarakat, (Latif, 2011: 585).

#### *Nilai Ketuhanan*

Nilai Ketuhanan Sukarno ini berhubungan dengan geografis dan juga tradisi religius kehidupan dari bangsa Indonesia yang berbentuk agraris. Sebagai bangsa yang berbentuk agraris, kehidupan dari masyarakat Indonesia lebih condong kearah bertani dan berternak. Indonesia sebagai negara yang agraris sangat ditentukan oleh kondisi alamnya, mengkondisikan keadaan alam sangatlah sulit diluar jangkauan daya manusia. Oleh sebab itu, manusia sebagai Insan yang lemah harus mengakuinya, bangsa Indonesia dari dahulu kala telah mempercayai dan meyakini adanya suatu dzat yang mengatur dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia, hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa Bangsa Indonesia berserah diri terhadap nasibnya dan berdoa untuk kepentingan hidup bersama.

Makna dari nilai Ketuhanan ini ialah Sukarno mengiginkan pondasi dasar dari pedoman kehidupan bangsa Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (Saksono, 2007: 65). Sukarno mengatakan bahwa Prinsip Ketuhanan! Bukan hanya Indonesia yakin dan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa saja, tetapi juga seharusnya dari masing-masing rakyat Indonesia harus bertuhan berdasarkan Tuhannya sendiri yang dipercaya. Islam hanya menyembah kepada Allah, Kristen melaksanakan perintah Tuhan Isa al Masih, orang Buddha melaksanakan peribadatan sesuai dengan ajaran kitab-kitab yang ada padanya. Semua masyarakat Indonesia harus bertuhan dengan cara memeluk salah agama yang ada. Negara harus memberikan jaminan kepada rakyat untuk beribadah sesuai kepercayaan yang dianutnya dengan leluasa. Seluruh rakyat Indonesia tidak boleh mementingkan egoisme agama, dan Indonesia harus menjadi negara yang BerKetuhanan, (Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pancasila, 1964: 29-30).

Nilai ketuhanan yang disampaikan Sukarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang pertama BPUPKI menduduki posisi paling bawah yaitu urutan kelima, sedangkan Pancasila saat ini nilai Ketuhanan berada pada posisi paling atas. Maksud Sukarno menempatkan nilai Ketuhanan pada urutan paling bawah ialah sebagai pondasi dari sila-sila pancasila lainnya agar menjadi lebih kuat. Posisi dasar atau akhir dari Sila Ketuhanan bermakna bahwa Tuhan merupakan landasan dasar awal dari terciptanya atau terbentuknya dari sila-sila yang lainnya, bukan memposisikan Tuhan berada dibawah. Sukarno menginginkan bangsa Indonesia memiliki pedoman dasar kehidupan yaitu Ketuhanan, dan negara memberikan kebebasan memilih Tuhan yang dipercayainya sesuai dengan kepercayaan yang diyakininya dan negara tidak boleh memaksa rakyatnya untuk memilih agama yang dipercaya.

#### **KESIMPULAN**

Nasionalisme atau sosio-nasionalisme menurut pandangan Sukarno ialah nasionalisme yang humanis, berasal dari bangsa Indonesia sendiri bukan berasal dari bangsa lain, serta lebih mementingkan bangsa dan negara daripada kepentingan Individu ataupun kelompok. Nilai-nilai dasar

dari Pancasila yang dikemukakan Sukarno merupakan hasil penggalian dari agama, kebudayaan, adat istiadat yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia dan telah diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat Indonesia. Penempatan sila Ketuhanan yang diletakkan paling akhir bukan berarti bahwa Sukarno telah mengutamakan nasionalisme daripada keimanannya, Sukarno melihat kondisi keadaan dari bangsa Indonesia yang akan merdeka mendapatkan ancaman kembali dari penjajah, oleh sebab itulah Sukarno melakukan upaya membangun kembali semangat bangsa Indonesia dengan menempatkan nilai kebangsaan pada posisi pertama, Posisi dasar atau akhir dari Sila Ketuhanan Sukarno bermakna bahwa Tuhan merupakan landasan dasar awal dari terciptanya atau terbentuknya dari sila-sila yang lainnya, bukan menmposisikan Tuhan berada dibawah. agar sebagai dasar utama terlaksananya asas-asas sebelumnya untuk dijalankan berdasarkan Ketuhanan.

## **REFERENSI**

- Hamka, Haq. (2011). Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam. Jakarta: RM Books
- Kaelan. (2013). Negara Kebangsaan Pancasila; Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasiny. Yogyakarta: Paradigma
- Latif, Yudi. (2011). Negara Paripurna. Jakarta: Gramedia
- Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pancasila. (1964). Camkan Pancasila, Pancasila Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Panitia Nasional Lahirnja Pantja Sila
- Saksono Gatut, Ign. (2007). Pancasila Soekarno. Yogyakarta: CV. Urna Cipta Media Jaya
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sukarno. (1964). Camkan Pancasila: Pancasila Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Sukarno. (1964). Dibawah Bendera Revolusi, Jilid Pertama. Jakarta: Panitya.